

Dampak konflik terhadap perkembangan ekonomi dan tingkat kesejahteraan rakyat (studi kasus Aceh) = The impact of political conflict on economic and social welfare development (Aceh case study)

Akhiruddin Mahjuddin, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20314941&lokasi=lokal>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan dan perkembangan perekonomian dan tingkat kesejahteraan rakyat Propinsi Aceh pada periode sebelum konflik (1980-1989), masa konflik (1990-2005) dan pasca perjanjian Helsinki (2006-2011).

Metodologi penelitian ini pada dasarnya merupakan studi empiris. Desain penelitian yang dipakai adalah metodologi deskriptif kualitatif. Selain itu juga dilakukan analisis kuantitatif atau analisis ekonometrika. Data sekunder terutama bersumber terutama dari BPS, Pemda Aceh, World Bank dan sumber lain yang valid. Terdapat dua model yang diestimasi yaitu:

Model 1: $LYRNM = 0 + 1 \text{ Linves} + 2 \text{ LAK} + 3 \text{ LAPBDR} + 4 \text{ Konflik}$

Model 2: $LYRMIGAS = 0 + 1 \text{ Linves} + 2 \text{ LAK} + 3 \text{ LAPBDR} + 4 \text{ Konflik}$.

Hasil penelitian menunjukkan Konflik berpengaruh negatif secara keseluruhan terhadap kinerja ekonomi. Konflik juga telah memperburuk tingkat kesejahteraan rakyat dimana kemiskinan, pendidikan dan kesehatan selama periode konflik terutama di wilayah konflik juga terus memburuk. Selama periode pengamatan, PDRB tidak termasuk Migas lebih stabil dibandingkan dengan PDRB Migas, ini memberi harapan untuk memperbaiki Aceh dengan tidak mengandalkan sektor Migas.

Dengan menggunakan metode ekonometrik dapat disimpulkan bahwa pengaruh pertumbuhan investasi, pertumbuhan angkatan kerja dan pertumbuhan APBD riil terhadap pertumbuhan PDRB tidak termasuk Migas sangatlah kecil.

Hasil estimasi dengan menggunakan variabel terikat PDRB Migas ternyata hasilnya sangat tidak baik, hal ini menunjukkan bahwa perkembangan PDRB Migas sulit dikontrol atau dikelola oleh pemerintah. Ini tidak lepas dari peranan sektor Migas dan begitu fluktuatifnya bisnis Migas di pasar internasional. Hasil analisis data berdasarkan kabupaten/kota menunjukkan antara lain bahwa daerah penghasil sumberdaya alam khususnya Migas merupakan daerah yang mengalami konflik berat, ketimpangan struktur produksi ditunjukkan ketergantungan yang besar terhadap Migas.

Saran kebijakan pemerintah Aceh harus segera dan terus menerus melakukan langkah-langkah pemulihan perekonomian dan kesejahteraan rakyat Aceh, tidak cukup hanya berhenti pada perjanjian Helsinki tapi perlu perbaikan-perbaikan internal khususnya pada Pemerintahan Aceh meliputi: penentuan prioritas utama pembangunan yang berkaitan langsung dengan upaya pemerintah dalam memperbaiki kinerja perekonomian serta kesejahteraan rakyat Aceh.

.....This research aims to analyze the growth and development of the economy and the welfare of the people of Aceh Province in the period before the conflict (1980-1989), the conflict (1990-2005) and post-agreement Helsinki (2006-2011).

The methodology of this study is basically an empirical study. Research design used in the conduct of research is a qualitative descriptive methodology. In addition, quantitative analysis or econometric analysis. Secondary data is mainly sourced mainly from the BPS, the Aceh government, World Bank and other valid

resources. There are two models estimated as follows:

Model 1: $LYRNM = 0 + 1 \text{ Linves} + 2 \text{ LAK} + 3 \text{ LAPBDR} + 4 \text{ Konflik}$

Model 2: $LYRMIGAS = 0 + 1 \text{ Linves} + 2 \text{ LAK} + 3 \text{ LAPBDR} + 4 \text{ Konflik}$.

The results showed an overall negative impact Conflict against economic performance. The conflict has also exacerbated the level of prosperity in which poverty, education and health over a period of conflict especially in conflict area also continued to deteriorate. During the observation period, GDP excluding oil and gas were more stable than oil and gas GDP, this gives hope to improve Aceh's oil and gas by not relying to oil and gas.

By using econometric methods can be concluded that the effect of investment growth, labor force growth and growing budget rill on the growth of GDP excluding oil and gas is very small. Estimation results using the dependent variable was the result of Oil and Gas GDP is not very good, this suggests that the development of oil and gas GDP is difficult to control or managed by the government. It can not be separated from the role of oil and gas sector and so fluctuated oil and gas business in international markets. The results of data analysis by district / city showed inter alia that the area of natural resources, especially oil and gas producer is an area that experienced heavy conflict, discrepancy production structure shown a great dependence on oil and gas.

Aceh government's policy advice should be immediately and continuously perform recovery steps of the economy and welfare of the people of Aceh, not enough to stop the Helshinky agreement but necessary internal improvements, especially in Aceh Government include: determination of development priorities that are directly related to government efforts improve economic performance and welfare of the Acehnese.